

ABSTRAK

BAYU SYAHPUTRA SITEPU (2210622035). PROBLEMATIKA PEMANFAATAN TANPA IZIN PENGGUNAAN MUSIK DAN/ATAU LAGU DI LAYANAN PUBLIK DALAM MELINDUNGI HAK PENCIPTA. Dibimbing oleh Handoyo Prasetyo sebagai Pembimbing Utama dan Heru Sugiyono sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini dilaksanakan dengan alasan mendasar untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan pemanfaatan tanpa izin penggunaan musik di layanan publik yang terjadi di Indonesia. Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi karya cipta seseorang. Pemanfaatan musik di layanan publik atau ruang komersial wajib membayar royalti hal ini dimuat dalam Pasal 12 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMKN diberi mandat untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan lagu atau musik di tempat yang melakukan kegiatan komersial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yaitu menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanpa izin penggunaan musik dan/atau lagu di layanan publik masih marak terjadi, kurangnya pemahaman akan literasi hukum serta penegakan hukum yang dinilai kurang tegas dan efektif menjadi tantangan dalam melindungi hak cipta. Selain itu, pengembangan teknologi berupa alat untuk melacak pelanggaran hak cipta serta pengawasan secara langsung oleh LMKN juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam upaya melindungi hak cipta di layanan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melindungi hak cipta membutuhkan sistem hukum yang responsif, platform yang kolaboratif, dan masyarakat yang sadar hak dan tanggung jawab. Tentu saja dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri kreatif, penyedia layanan digital, serta masyarakat keadilan ekosistem musik di Indonesia akan tercapai dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Layanan Publik; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

BAYU SYAHPUTRA SITEPU (2210622035). THE PROBLEM OF UNAUTHORIZED USE OF MUSIC AND/OR SONGS IN PUBLIC SERVICES IN PROTECTING CREATORS RIGHTS
Supervised by Handoyo Prasetyo as Principal Supervisor and Heru Sugiyono as Co-Supervisor.

This research was conducted with the fundamental objective of analyzing and assessing the issue of unauthorized use of music in public services in Indonesia. Copyright, as part of intellectual property rights, plays a crucial role in protecting a person's creative work. The use of music in public services or commercial spaces requires royalty payments, as stipulated in Article 12 of Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The National Institute of Music and/or Music (LMKN) is mandated to collect royalties from parties using songs or music in commercial settings. This research utilizes a normative legal research method, conducted by reviewing applicable laws and regulations applied to a specific legal issue. The documents used are also related to the form of research on written legal norms, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and other supporting regulations. The results of this study indicate that unauthorized use of music and/or songs in public services is still widespread. A lack of understanding of legal literacy, along with ineffective and indecisive law enforcement, pose challenges in protecting copyright. Furthermore, technological development, including tools to track copyright infringement and direct oversight by the National Music Agency (LMKN), can also help increase the effectiveness of copyright protection efforts in public services. This research shows that protecting copyright requires a responsive legal system, collaborative platforms, and a public aware of rights and responsibilities. Of course, by involving various parties, including the government, the creative industry, digital service providers, and the community, a just music ecosystem in Indonesia will be achieved and can support sustainable economic growth.

Keywords: *Copy Right; Public Services; Law Enforcement.*